Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Volume 4, Nomor 4, November 2026
E-ISSN.: 3031-3406; P-ISSN.: 3031-3414, Hal. 17-31
DOI: https://doi.org/10.61132/jepi.v4i4.2756
Tersedia: https://journal.areai.or.id/index.php/jepi

Persepsi Masyarakat terhadap Infrastruktur Pariwisata dan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi

Chandra Murti Dewi Widowati Hermajiwandini[1*], Dio Bimo Saputro[2], Jaka Sanjaya[3]
[1,2]Universitas Terbuka, Indonesia
[3]Kementerian Ekonomi Kreatif, Indonesia
Email: chandramurti@ecampus.ut.ac.id[1], dio.bimo@ecampus.ut.ac.id[2], jaka.sanjaya@ekraf.go.id[3]
**Penulis Korespondensi: chandramurti@ecampus.ut.ac.id*

Abstract. *This study investigates how residents of Banyuwangi Regency, a National Tourism Strategic Area in East Java, Indonesia, perceive the supply and quality of tourism-supporting infrastructure and which development issues they regard as most pressing for tourism and the creative economy. A cross-sectional survey was conducted through structured face-to-face interviews with 250 respondents selected by multistage random sampling, ten from each of the regency's 25 sub-districts. The responses were analysed descriptively through percentage distributions and comparisons across facility types and sub-districts. Places of worship, eating places and shopping venues were the best-rated facilities, with roughly 58 to 69 per cent of respondents judging them adequate. Transportation and facilities for people with disabilities were rated least favourably; only 11.36 per cent of respondents considered disability-related facilities adequate, while 38.41 per cent described them as limited. Provision was also spatially uneven, with Tegaldlimo, Kabat and Pesanggaran scoring consistently high and Songgon, Sempu and Singojuruh lagging behind. Road access and transport emerged as the foremost tourism concern, whereas human-resource development and mentoring, followed by access to capital, dominated the creative-economy agenda. The findings imply that infrastructure investment should be geographically targeted and inclusive by design.*

Keywords: *Banyuwangi Regency; Development Priorities; Inclusive Tourism; Public Perception; Tourism Infrastructure*

Abstrak. Penelitian ini menelaah bagaimana penduduk Kabupaten Banyuwangi, yang berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menilai ketersediaan dan kondisi infrastruktur penunjang wisata serta isu-isu yang dipandang paling mendesak dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Survei kuantitatif dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 250 responden yang dipilih dengan teknik acak bertahap, masing-masing 10 orang dari 25 kecamatan. Data dianalisis secara deskriptif melalui distribusi persentase serta perbandingan antarjenis fasilitas dan antarkecamatan. Tempat ibadah, tempat makan, dan sarana perbelanjaan memperoleh penilaian paling baik, dengan sekitar 58–69 persen responden menilainya memadai. Sebaliknya, transportasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dinilai paling lemah; hanya 11,36 persen responden menganggap fasilitas disabilitas memadai, sedangkan 38,41 persen menilainya terbatas. Penyediaan fasilitas juga timpang antarwilayah: Tegaldlimo, Kabat, dan Pesanggaran konsisten unggul, sementara Songgon, Sempu, dan Singojuruh tertinggal. Akses jalan dan transportasi menjadi isu pariwisata yang paling sering disebut, sedangkan pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan, disusul akses permodalan, mendominasi agenda ekonomi kreatif. Temuan ini mengisyaratkan perlunya investasi infrastruktur yang tepat sasaran secara geografis dan inklusif sejak perancangannya.

Kata Kunci: Kabupaten Banyuwangi; Infrastruktur Pariwisata; Pariwisata Inklusif; Persepsi Masyarakat; Prioritas Pembangunan

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata dan ekonomi kreatif kerap diposisikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sarana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Ramadani & Sukmana, 2024). Potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila destinasi ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Kajian tentang pengembangan destinasi menempatkan aksesibilitas dan amenitas sebagai pilar yang berdampingan dengan atraksi (Dikky et al., 2024), sebab keterjangkauan wilayah menentukan seberapa mudah wisatawan

Naskah Masuk: 14 Juli 2026; Revisi: 14 September 2026; Diterima: 23 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

menuju dan bergerak di dalam suatu destinasi (Moroshkina & Kondrateva, 2021). Sejumlah penelitian mutakhir pun mengaitkan aksesibilitas dengan minat berkunjung (Salmah & Rizal, 2022), persepsi wisatawan terhadap destinasi (Yan et al., 2024), kepuasan (Mohamad et al., 2024), dan keberlanjutan destinasi (Kovaçi et al., 2026).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memperoleh perhatian kebijakan secara khusus. Wilayah ini masuk dalam daftar destinasi pariwisata prioritas atau "10 Bali Baru" pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan kemudian ditetapkan sebagai KSPN melalui Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 100 Tahun 2018. Pemerintah kabupaten menanggapi status tersebut dengan berbagai program, mulai dari penataan destinasi dan peningkatan mutu sumber daya manusia hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi yang paling menonjol ialah pariwisata berbasis kearifan lokal dan festival budaya, seperti Banyuwangi Ethno Carnival dan Banyuwangi Tour de Ijen, yang tidak hanya mendatangkan pengunjung, tetapi juga merawat tradisi dan menggerakkan perekonomian lokal. Pada sisi ekonomi kreatif, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar diarahkan untuk membuka kesempatan kerja serta memperkuat daya saing produk daerah.

Keberhasilan kebijakan semacam itu tidak semata-mata ditentukan oleh prakarsa pemerintah, tetapi juga oleh cara masyarakat selaku pengguna dan pemangku kepentingan menilai sarana dan layanan yang tersedia. Persepsi penduduk lokal telah diakui sebagai masukan penting bagi perencanaan pariwisata berkelanjutan (Sezerel & Karagoz, 2023) dan sebagai penentu dukungan terhadap pengembangan wisata berbasis komunitas (Nugroho & Numata, 2022; Zamzami & Iwabuchi, 2024). Penilaian warga terhadap transportasi lokal yang bersinggungan dengan kegiatan wisata juga terbukti informatif bagi perbaikan layanan (Rodrigues, 2021). Di samping itu, diskusi mengenai infrastruktur kian menuntut dimensi inklusivitas, karena prasarana yang ramah penyandang disabilitas dipandang sebagai fondasi pariwisata yang dapat diakses oleh semua kalangan (Gonda, 2023; Tao et al., 2024).

Kendati demikian, kajian yang memotret persepsi warga secara terpilah hingga tingkat kecamatan pada kawasan strategis pariwisata, sekaligus memadukannya dengan peta prioritas pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, masih relatif jarang dijumpai dalam literatur yang ditelaah penulis. Padahal, informasi yang terpilah secara geografis diperlukan agar alokasi sumber daya tidak bersifat seragam dan agar kesenjangan yang dialami kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, tidak terabaikan. Kebaruan artikel ini terletak pada pengungkapan variasi antarkecamatan atas ketersediaan dan kondisi delapan jenis fasilitas

penunjang wisata, serta pada pemetaan isu prioritas menurut warga di kabupaten berstatus KSPN.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan, pertama, menggambarkan persepsi masyarakat terhadap ketersediaan dan kondisi infrastruktur penunjang destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi; kedua, mengidentifikasi perbedaan capaian antarkecamatan; dan ketiga, memetakan isu prioritas yang dianggap perlu ditangani dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengembangan destinasi lazim dibaca melalui kerangka 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (Dikky et al., 2024). Atraksi menjelaskan alasan orang melakukan perjalanan, sedangkan aksesibilitas dan amenitas menentukan apakah perjalanan itu layak, aman, dan nyaman. Aksesibilitas tidak terbatas pada kondisi jalan atau moda angkutan, tetapi juga mencakup ketersediaan informasi dan kemudahan komunikasi yang membantu wisatawan mencapai tujuan. Moroshkina dan Kondrateva (2021) memandang keterjangkauan regional sebagai faktor yang turut menentukan perkembangan destinasi, sementara Kovaçi et al. (2026) menempatkan aksesibilitas transportasi dan pengalaman wisata sebagai penggerak destinasi yang berkelanjutan. Dari sisi perilaku wisatawan, Salmah dan Rizal (2022) serta Mohamad et al. (2024) meneliti pengaruh aksesibilitas terhadap minat berkunjung dan kepuasan. Adapun amenitas, seperti akomodasi, tempat makan, toko cenderamata, dan fasilitas umum, menopang kenyamanan sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan dalam mengenal budaya dan sumber daya alam setempat.

Masyarakat lokal bukan sekadar penonton dalam pariwisata. Cara penduduk menilai kondisi dan dampak kegiatan wisata memengaruhi tingkat dukungan mereka terhadap pengembangannya (Nugroho & Numata, 2022; Sezerel & Karagoz, 2023). Keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan, baik melalui kelompok warga seperti komunitas nelayan (Zamzami & Iwabuchi, 2024) maupun melalui program wisata berbasis komunitas (Setiawati & Syam, 2023), memerlukan basis informasi tentang apa yang sesungguhnya dirasakan warga. Persepsi warga juga relevan dalam urusan transportasi yang terintegrasi dengan kegiatan wisata (Rodrigues, 2021). Karena penduduk berinteraksi dengan fasilitas secara sehari-hari, penilaian mereka dapat diperlakukan sebagai indikator awal mutu infrastruktur, meskipun tidak menggantikan pengukuran teknis maupun penilaian wisatawan.

Perspektif pariwisata inklusif menekankan keterlibatan kelompok yang terpinggirkan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat (Scheyvens & Biddulph, 2018). Dalam

konteks aksesibilitas, Gonda (2023) menegaskan peran infrastruktur bagi berkembangnya pariwisata aksesibel. Tao et al. (2024) mengelompokkan wisatawan dengan disabilitas fisik berdasarkan hambatan perjalanan yang mereka rasakan, dan Nigg et al. (2024) menelaah kendala berwisata sepanjang rantai nilai pariwisata. Dickson et al. (2024) mengusulkan perancangan bersama komunitas disabilitas, sedangkan Duignan et al. (2023) menyoroti jarak antara sikap dan praktik dalam pengembangan pariwisata aksesibel. Aspek informasi digital turut diperhitungkan, misalnya melalui inklusi disabilitas pada situs web pariwisata (Park et al., 2022).

Ekonomi kreatif dalam regulasi nasional dipahami sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia dan berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi (Republik Indonesia, 2019). Pada tataran destinasi, pelaku kreatif seperti perajin, pelaku kuliner, dan pegiat seni menyediakan produk serta pengalaman lokal bagi wisatawan, sehingga kebutuhan mereka akan sumber daya manusia yang terampil, modal, bahan baku, dan akses pasar menjadi bagian dari agenda pembangunan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertolak dari dugaan bahwa penilaian atas ketersediaan fasilitas bergerak searah dengan penilaian atas kondisinya, bahwa capaian tidak merata antarwilayah, dan bahwa transportasi serta fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi titik lemah. Dugaan ini bersifat deskriptif dan tidak diuji secara inferensial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan survei potong lintang yang bersifat deskriptif. Data diambil dari survei kepuasan masyarakat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi; artikel ini hanya melaporkan bagian yang berkaitan dengan persepsi terhadap infrastruktur penunjang wisata dan isu prioritas pembangunan. Penyusunan survei merujuk pada pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Kementerian PANRB, 2017).

Populasi penelitian adalah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang pernah memanfaatkan layanan pariwisata dan ekonomi kreatif. Jumlah penduduk kabupaten pada tahun 2020 tercatat 1.708.114 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan mengasumsikan populasi sekitar 1.750.000 jiwa dan berpedoman pada rumus Krejcie dan Morgan (1970), ukuran sampel ditetapkan sekitar 250 responden. Jumlah ini setara dengan batas galat kurang lebih 6,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi varians maksimum (P = Q

= 0,5). Responden dipilih melalui teknik acak bertahap (multistage random sampling) dari 25 kecamatan dengan alokasi yang sama, yaitu 10 orang per kecamatan.

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang memuat data demografis responden, penilaian ketersediaan dan kondisi delapan jenis fasilitas penunjang wisata (tempat ibadah, tempat makan, sarana perbelanjaan, fasilitas umum, rambu dan petunjuk arah, akomodasi, transportasi, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas), penilaian atas 14 aspek umum pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pertanyaan terbuka mengenai isu yang menurut responden perlu diprioritaskan pemerintah daerah. Untuk keperluan pelaporan, jawaban atas ketersediaan dan kondisi dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu memadai atau baik, sedang, terbatas atau buruk, dan tidak menjawab.

Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner tersebut oleh peneliti yang dibantu sejumlah enumerator yang telah memperoleh pelatihan. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui distribusi persentase setiap kategori jawaban, yang selanjutnya dibandingkan antarjenis fasilitas dan antarkecamatan. Jawaban terbuka tentang prioritas dikelompokkan ke dalam kategori isu dan dihitung proporsinya. Karena analisisnya deskriptif, keterkaitan antara ketersediaan dan kondisi fasilitas ditafsirkan berdasarkan kesesuaian pola, bukan berdasarkan uji statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 250 responden yang tersebar di 25 kecamatan, masing-masing 10 orang, berpartisipasi dalam survei. Dari segi usia, kelompok di atas 50 tahun mendominasi dengan proporsi 52,50%, disusul kelompok usia 40–49 tahun (20,68%), 30–39 tahun (14,55%), dan di bawah 29 tahun (12,27%). Komposisi ini berarti penilaian yang terhimpun lebih banyak mencerminkan pandangan penduduk paruh baya dan lanjut usia, sehingga persepsi generasi muda belum terwakili secara proporsional.

Menurut pekerjaan, buruh menjadi kelompok terbesar (30,00%), diikuti ibu rumah tangga (22,73%) dan pedagang barang dan jasa (11,82%). Kelompok lainnya terdiri atas petani atau nelayan (11,14%), wiraswasta barang dan jasa (8,18%), pegawai swasta (4,32%), aparatur sipil negara dan tenaga honorer (1,82%), serta pelajar dan mahasiswa (1,82%). Responden dengan pekerjaan di luar kategori tersebut berjumlah 4,32% dan yang belum bekerja 3,86%. Sebaran ini menunjukkan bahwa data lebih banyak merekam pengalaman warga biasa sebagai pengguna fasilitas daripada sudut pandang pelaku industri pariwisata.

Persepsi terhadap Infrastruktur Penunjang Destinasi

Ketersediaan fasilitas

Infrastruktur, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung merupakan unsur penting dalam pengembangan pariwisata, sebab ketiganya memengaruhi kenyamanan, keamanan, dan daya tarik pengalaman berwisata (Dikky et al., 2024; Moroshkina & Kondrateva, 2021). Responden karena itu diminta menilai ketersediaan fasilitas penunjang pada objek wisata di sekitar tempat tinggal mereka. Tabel 1 memperlihatkan bahwa tempat ibadah merupakan fasilitas dengan penilaian ketersediaan tertinggi; 69,32% responden menilainya memadai atau sangat memadai dan hanya 2,73% yang menilainya terbatas. Tempat makan (60,00%) dan sarana perbelanjaan (57,73%) menyusul pada urutan berikutnya. Fasilitas umum (42,05%), rambu dan petunjuk arah (41,36%), serta akomodasi (40,45%) berada pada kisaran menengah, dengan penilaian memadai sedikit di atas 40%.

Tabel 1. Ketersediaan Fasilitas Penunjang Wisata menurut Persepsi Responden (%)

Jenis fasilitas	Memadai / sangat memadai	Sedang	Terbatas / sangat terbatas	Tidak menjawab
Tempat ibadah	69,32	17,27	2,73	10,68
Tempat makan (restoran, warung, kafe)	60,00	21,59	5,00	13,41
Sarana perbelanjaan (pasar, supermarket, toko cenderamata)	57,73	24,77	5,45	12,05
Fasilitas umum (toilet umum, area parkir, taman)	42,05	27,27	14,77	15,91
Rambu dan petunjuk arah	41,36	28,41	12,73	17,50
Akomodasi (hotel, penginapan, homestay)	40,45	21,82	18,41	19,32
Transportasi (angkutan umum, kendaraan sewa)	33,64	31,82	18,64	15,91
Fasilitas bagi penyandang disabilitas	11,36	20,45	38,41	29,77

Sumber: Data primer survei lapangan (diolah penulis).

Titik lemah tampak pada dua fasilitas. Transportasi dinilai terbatas atau sangat terbatas oleh 18,64% responden, sedangkan fasilitas bagi penyandang disabilitas bahkan dinilai demikian oleh 38,41% responden; hanya 11,36% yang menilainya memadai, dan hampir sepertiga responden (29,77%) tidak menjawab. Angka tidak menjawab yang tinggi pada fasilitas disabilitas dapat dibaca sebagai petunjuk bahwa keberadaan fasilitas tersebut kurang dikenal atau kurang terlihat bagi warga. Temuan ini senada dengan penekanan Gonda (2023) bahwa infrastruktur menjadi prasyarat bagi pariwisata aksesibel, dan dengan temuan literatur bahwa hambatan fisik dan informasi masih membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berwisata (Nigg et al., 2024; Tao et al., 2024).

Kondisi fasilitas

Selain ketersediaan, kondisi fisik fasilitas memengaruhi kenyamanan wisatawan dan kemungkinan mereka berkunjung kembali. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, pola penilaian kondisi hampir mengikuti pola ketersediaan. Tempat ibadah kembali menempati posisi teratas, dengan 69,32% responden menilai kondisinya baik atau sangat baik. Sarana perbelanjaan (57,50%) dan tempat makan (56,59%) menyusul dengan selisih yang tipis, sedangkan akomodasi dinilai baik oleh 47,50% responden. Fasilitas umum (44,55%), rambu dan petunjuk arah (42,27%), serta transportasi (41,59%) berada pada rentang 40–45%; capaian tersebut menunjukkan bahwa sarana transportasi tersedia, tetapi aspek tertentu masih perlu dibenahi mengingat perannya yang sentral dalam perjalanan wisata (Kovaçi et al., 2026).

Tabel 2. Kondisi Fasilitas Penunjang Wisata menurut Persepsi Responden (%)

Jenis fasilitas	Baik / sangat baik	Sedang	Buruk / sangat buruk	Tidak menjawab
Tempat ibadah	69,32	19,77	1,59	9,32
Sarana perbelanjaan (pasar, supermarket, toko cenderamata)	57,50	28,18	2,50	11,82
Tempat makan (restoran, warung, kafe)	56,59	27,50	2,27	13,64
Akomodasi (hotel, penginapan, homestay)	47,50	29,32	3,41	19,77
Fasilitas umum (toilet umum, area parkir, taman)	44,55	34,09	6,59	14,77
Rambu dan petunjuk arah	42,27	32,73	7,50	17,50
Transportasi (angkutan umum, kendaraan sewa)	41,59	34,55	7,27	16,59
Fasilitas bagi penyandang disabilitas	17,05	23,86	30,00	29,09

Sumber: Data primer survei lapangan (diolah penulis).

Kekhawatiran terbesar kembali tertuju pada fasilitas bagi penyandang disabilitas: hanya 17,05% responden menilai kondisinya baik, sedangkan 30,00% menilainya buruk atau sangat buruk. Keselarasan antara keterbatasan ketersediaan dan rendahnya mutu fasilitas ini menegaskan bahwa persoalannya bukan semata kekurangan jumlah, melainkan juga kualitas dan keterpeliharaan sarana yang telah ada. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar jenis infrastruktur memperoleh penilaian positif dari kelompok mayoritas responden, kebutuhan pembenahan paling mendesak terletak pada fasilitas disabilitas dan, pada tingkat yang lebih ringan, transportasi.

Variasi antarkecamatan

Agregat tingkat kabupaten menutupi ketimpangan yang cukup lebar antarkecamatan. Tabel 3 meringkas kecamatan dengan penilaian ketersediaan tertinggi dan terendah untuk setiap jenis fasilitas. Tegaldlimo muncul berulang pada kelompok teratas, yakni untuk akomodasi (90,00%), transportasi (85,00%), tempat makan (95,00%), fasilitas umum (90,00%), tempat ibadah (100%), sarana perbelanjaan (100%), serta rambu dan petunjuk arah

(75,00%). Kabat dan Pesanggaran juga sering hadir pada kelompok atas, sedangkan Songgon hampir selalu berada pada dasar distribusi dengan nilai 0% untuk ketersediaan akomodasi, transportasi, tempat makan, fasilitas umum, sarana perbelanjaan, serta rambu dan petunjuk arah.

Tabel 3. Kecamatan dengan Penilaian Ketersediaan Tertinggi dan Terendah menurut Jenis Fasilitas

Jenis fasilitas	Capaian tertinggi (memadai / sangat memadai)	Capaian terendah (memadai / sangat memadai)
Akomodasi	Tegaldlimo (90,00%), Kabat (85,00%), Banyuwangi (73,33%)	Pesanggaran, Singojuruh, Songgon (masing-masing 0,00%)
Transportasi	Pesanggaran (90,00%), Tegaldlimo (85,00%), Kabat (65,00%)	Sempu, Singojuruh, Songgon (masing-masing 0,00%)
Tempat makan	Gambiran dan Tegaldlimo (95,00%), Banyuwangi (86,67%)	Songgon (0,00%), Licin (20,00%), Sempu (30,00%)
Fasilitas umum	Tegaldlimo (90,00%), Gambiran (80,00%)	Songgon (0,00%), Licin, Sempu, Singojuruh (10,00%)
Tempat ibadah	Kabat, Singojuruh, Tegaldlimo, Tegalsari (100%)	Songgon (0,00%)
Sarana perbelanjaan	Rogojampi dan Tegaldlimo (100%), Pesanggaran (90,00%)	Songgon (0,00%), Glagah dan Wongsorejo (10,00%)
Rambu dan petunjuk arah	Pesanggaran (80,00%), Tegaldlimo (75,00%)	Songgon (0,00%), Siliragung dan Sempu (10,00%)
Fasilitas disabilitas	Genteng dan Kabat (35,00%)	Wongsorejo, Glagah, Sempu (masing-masing 0,00%)

Sumber: Data primer survei lapangan (diolah penulis); nilai menunjukkan persentase responden per kecamatan (n = 10).

Pola yang sama berlaku pada penilaian kondisi. Untuk akomodasi, Kabat (95,00%), Tegaldlimo (85,00%), dan Pesanggaran (80,00%) memperoleh penilaian baik tertinggi, sementara Tegalsari (10,00%) dan Songgon (0,00%) berada pada ujung bawah. Untuk transportasi, Pesanggaran dan Rogojampi sama-sama mencatat 100% penilaian baik, tetapi Glagah, Sempu, dan Songgon tertinggal jauh dengan Glagah pada angka 0%. Tempat makan di Pesanggaran dinilai baik oleh seluruh responden, berbeda dengan Songgon (0%) serta Sempu dan Glagah (masing-masing 20%). Fasilitas disabilitas dinilai paling baik di Genteng dan Kabat (masing-masing 45%), tetapi tidak satu pun responden di Glagah, Licin, dan Sempu yang menilainya baik. Secara umum, kecamatan dengan ketersediaan tinggi cenderung pula menerima penilaian kondisi yang baik, dan sebaliknya; kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa kecukupan fasilitas berjalan seiring dengan pemeliharaannya.

Beberapa temuan menyimpang layak dicatat karena menunjukkan bahwa persoalan antarwilayah tidak selalu tunggal. Di Singojuruh, 60,00% responden menilai fasilitas umum terbatas, 90,00% menilai rambu dan petunjuk arah terbatas, dan tidak seorang pun menilai akomodasi memadai, namun seluruh responden menilai tempat ibadah memadai. Di Licin, separuh responden (50,00%) menilai sarana perbelanjaan terbatas, sedangkan kondisi sarana

tersebut tetap dinilai sedang. Di Srono, 30,00% responden menilai kondisi fasilitas umum buruk, angka terburuk dibandingkan kecamatan lain. Variasi semacam ini mendukung argumen bahwa penilaian infrastruktur wisata perlu dibaca per wilayah agar intervensi tidak bersifat seragam, sejalan dengan pandangan bahwa aksesibilitas regional adalah faktor pembeda perkembangan destinasi (Moroshkina & Kondrateva, 2021).

Isu Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penilaian atas isu umum

Responden diminta menilai 14 aspek pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya, tersaji pada Tabel 4, memperlihatkan bahwa sebagian besar aspek memperoleh penilaian positif dari sekitar 40–50% responden. Mutu pelayanan di destinasi wisata menempati urutan teratas (52,05%), disusul keamanan destinasi dan upaya pemerintah melestarikan lingkungan, yang masing-masing dinilai baik oleh 48,64% responden. Hal ini mencerminkan persepsi yang cukup positif terhadap pengelolaan keamanan dan keberlanjutan lingkungan wisata.

Tabel 4. Penilaian Responden atas Aspek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banyuwangi (%)

Aspek	Baik / sangat baik	Sedang	Buruk / sangat buruk	Tidak menjawab
Mutu pelayanan di destinasi wisata	52,05	28,18	2,73	17,05
Mutu keamanan di destinasi wisata	48,64	31,14	2,50	17,73
Upaya pemerintah melestarikan lingkungan destinasi	48,64	29,32	1,82	20,23
Upaya pemerintah mengembangkan destinasi baru	47,73	29,55	2,50	20,23
Ketersediaan fasilitas umum di sekitar destinasi	47,50	32,05	4,32	16,14
Upaya pemerintah meningkatkan infrastruktur sekitar destinasi	45,68	31,59	2,73	20,00
Ketersediaan informasi tentang destinasi wisata	45,45	30,68	4,09	19,77
Peran masyarakat dalam pengembangan destinasi	45,00	30,91	1,36	22,73
Mutu promosi destinasi oleh pemerintah	44,55	30,91	2,27	22,27
Mutu infrastruktur di destinasi wisata	44,32	34,32	2,50	18,86
Mutu produk wisata lokal	42,73	33,86	3,86	19,55
Ketersediaan transportasi menuju destinasi	40,45	30,91	9,32	19,32
Ketersediaan akomodasi di sekitar destinasi	40,23	32,95	4,77	22,05
Upaya pemerintah memberi pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	34,09	35,68	3,18	27,05

Sumber: Data primer survei lapangan (diolah penulis).

Sebaliknya, beberapa aspek masih menyisakan ruang perbaikan. Pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif memperoleh penilaian baik terendah, yakni 34,09%, dengan 27,05% responden tidak menjawab; kombinasi ini

mengindikasikan jangkauan pemberdayaan pelaku usaha yang belum merata atau belum dikenali publik. Ketersediaan transportasi menuju destinasi juga mencatat proporsi penilaian buruk tertinggi (9,32%), yang konsisten dengan temuan tentang lemahnya transportasi pada bagian sebelumnya. Adapun ketersediaan akomodasi diwarnai oleh 22,05% responden yang tidak menjawab, yang dapat menandakan minimnya informasi atau mutu akomodasi yang tidak merata. Peran masyarakat dalam pengembangan destinasi dinilai baik oleh 45,00% responden, tetapi 22,73% tidak menjawab, angka tidak menjawab kedua tertinggi setelah aspek pelatihan; hal ini menyiratkan bahwa keterlibatan warga belum sepenuhnya dirasakan, padahal partisipasi komunitas dipandang krusial bagi keberlanjutan pariwisata (Setiawati & Syam, 2023; Zamzami & Iwabuchi, 2024).

Prioritas yang diharapkan masyarakat

Pada pertanyaan terbuka mengenai isu yang sebaiknya diutamakan pemerintah daerah di bidang pariwisata, akses jalan dan transportasi paling sering disebut, yaitu oleh 28,41% responden (Tabel 5). Jawaban ini sejalan dengan kelemahan transportasi yang terungkap pada penilaian fasilitas dan menguatkan posisi aksesibilitas sebagai determinan utama daya saing destinasi (Kovaçi et al., 2026; Salmah & Rizal, 2022). Kebersihan lingkungan, promosi wisata, mutu produk wisata lokal, pelayanan di destinasi, dan partisipasi masyarakat juga disebut sebagai bidang yang perlu diperhatikan. Namun demikian, 41,82% responden menyatakan tidak tahu isu apa yang perlu diprioritaskan. Angka ini bisa mencerminkan terbatasnya informasi publik tentang rencana dan kebijakan pariwisata daerah, atau lemahnya komunikasi dan pelibatan warga dalam proses pembangunan pariwisata.

Pada sektor ekonomi kreatif, isu prioritas yang paling banyak dikemukakan ialah pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan (28,86%), yang menandakan bahwa warga memandang peningkatan keterampilan dan bimbingan usaha sebagai faktor kunci pertumbuhan sektor ini. Akses permodalan menempati posisi kedua (17,27%), diikuti akses bahan baku (9,77%), konektivitas antarwilayah (6,14%), dan penambahan serta perbaikan gerai penjualan (5,68%); sisanya (8,86%) berupa isu lain di luar kategori yang disediakan. Seperti pada sektor pariwisata, hampir separuh responden (47,50%) tidak menjawab atau tidak mengetahui isu yang perlu diprioritaskan, sehingga literasi dan sosialisasi mengenai ekonomi kreatif tampaknya masih perlu diperkuat.

Tabel 5. Isu yang Perlu Diprioritaskan Pemerintah Daerah menurut Responden (Pertanyaan Terbuka, %)

Sektor	Isu prioritas	Persentase responden
Pariwisata	Akses jalan dan transportasi	28,41
Pariwisata	Tidak tahu / tidak menjawab	41,82
Ekonomi kreatif	Pengembangan SDM dan pendampingan	28,86
Ekonomi kreatif	Akses permodalan	17,27
Ekonomi kreatif	Akses bahan baku	9,77
Ekonomi kreatif	Konektivitas antarwilayah	6,14
Ekonomi kreatif	Penambahan dan perbaikan gerai penjualan	5,68
Ekonomi kreatif	Lainnya	8,86
Ekonomi kreatif	Tidak tahu / tidak menjawab	47,50

Sumber: Data primer survei lapangan (diolah penulis); hanya isu dominan yang ditampilkan.

Implikasi Kebijakan

Arah intervensi

Temuan di atas memberikan landasan empiris bagi pemerintah kabupaten untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara lebih terarah. Setidaknya terdapat tiga arah intervensi yang dapat dipertimbangkan:

a. Penguatan infrastruktur secara berbasis wilayah, dengan mengutamakan kecamatan berpenilaian rendah seperti Songgon, Sempu, dan Singojuruh pada aspek akomodasi, transportasi, fasilitas umum, serta rambu dan petunjuk arah, sekaligus mengadopsi praktik baik dari kecamatan berkinerja tinggi seperti Tegaldlimo, Kabat, dan Pesanggaran.
b. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melalui penambahan fasilitas di kecamatan yang belum memilikinya, pemastian bahwa pembangunan baru memenuhi standar aksesibilitas, pelatihan bagi penyedia layanan publik dan pariwisata, serta pelibatan komunitas disabilitas dalam perancangan sebagaimana disarankan Dickson et al. (2024).
c. Perbaikan komunikasi publik dan pemberdayaan pelaku usaha, mengingat tingginya proporsi responden yang tidak menjawab, lewat sosialisasi program pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan serta pendampingan yang lebih luas, dan fasilitasi akses permodalan.

Di samping tiga arah tersebut, pemantauan dan evaluasi berkala atas kondisi fasilitas penting dilakukan agar perbaikan yang telah dikerjakan terpelihara, mengingat penilaian kondisi cenderung menyertai penilaian ketersediaan. Pengintegrasian fasilitas penunjang, seperti akomodasi, transportasi, dan tempat ibadah, ke dalam rute dan paket wisata juga berpotensi memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara umum menilai infrastruktur penunjang wisata cukup baik dari segi ketersediaan maupun kondisi, terutama untuk tempat ibadah, tempat makan, dan sarana perbelanjaan. Namun, transportasi dan terlebih lagi fasilitas bagi penyandang disabilitas masih dinilai lemah; hanya 11,36% responden menganggap fasilitas disabilitas memadai dan 17,05% menilai kondisinya baik. Capaian juga tidak merata antarwilayah, dengan Tegaldlimo, Kabat, dan Pesanggaran relatif unggul, sedangkan Songgon, Sempu, dan Singojuruh relatif tertinggal.

Terkait isu prioritas, akses jalan dan transportasi menjadi perhatian utama pada sektor pariwisata, sedangkan pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan serta akses permodalan menjadi perhatian utama pada ekonomi kreatif. Tingginya proporsi responden yang belum mengetahui isu prioritas memberi petunjuk perlunya komunikasi publik yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan pembenahan transportasi dan fasilitas disabilitas, memusatkan intervensi pada kecamatan berkinerja rendah, memperluas pelatihan dan pendampingan pelaku usaha, serta memperkuat sosialisasi program kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Analisis bersifat deskriptif dan berbasis persepsi pada satu kurun waktu, sehingga belum menjelaskan hubungan sebab-akibat maupun mengukur mutu teknis infrastruktur. Sampel per kecamatan hanya 10 responden sehingga persentase tingkat kecamatan sangat sensitif terhadap perubahan satu-dua jawaban, dan komposisi responden condong ke kelompok usia di atas 50 tahun. Penelitian selanjutnya disarankan memperbesar sampel per kecamatan, melibatkan wisatawan dan penyandang disabilitas secara langsung, menggabungkan penilaian persepsi dengan audit fisik fasilitas, serta menggunakan analisis inferensial untuk menguji hubungan antara ketersediaan, kondisi, dan kepuasan.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dickson, T. J., Darcy, S., & Schweinsberg, S. (2024). Co-designing accessible tourism WITH the disability community for embodied choice. *Tourism Geographies, 27*(7), 1377–1398. https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2423162

Dikky, D. N. H., Hasbianur, R. R., Lutfiani, S., & Komalasari, A. (2024). SWOT analysis of Aryakibansland tourist destination development using 3A tourism components (attraction, accessibility and amenity). *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA), 3*(1), 59–66. https://doi.org/10.20414/juwita.v3i1.10359

Duignan, M. B., Brittain, I., Hansen, M., Fyall, A., Gerard, S., & Page, S. (2023). Leveraging accessible tourism development through mega-events, and the disability-attitude gap. *Tourism Management, 99*, 104766. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104766

Gonda, T. (2023). The importance of infrastructure in the development of accessible tourism. *Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8*(2), 2735. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i2.2735

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Kovaçi, I., Tase, M., Tahiri, L., Bytyçi, B., Kovaçi, X., & Musa, V. (2026). Transport accessibility and tourist experience as drivers of sustainable destination: A case study of Kosovo. *GeoJournal of Tourism and Geosites, 67*(3), 2501–2508. https://doi.org/10.30892/gtg.67358-1870

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement, 30*(3), 607–610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308

Mohamad, R. A., Widawati, I. A. P., & Damayanti, T. (2024). The influence of service quality, destination image, accessibility on tourist satisfaction in the Botubarani Bonebolango whale shark tourist destination, Gorontalo. *Journal of Mandalika Review, 3*(2), 57–67. https://doi.org/10.55701/mandalika.v3i2.195

Moroshkina, M. V., & Kondrateva, S. V. (2021). Regional accessibility as a factor in the development of a tourist destination. *Regionology, 29*(1), 60–81. https://doi.org/10.15507/2413-1407.114.029.202101.060-081

Nigg, J. J., Plaikner, A., Peters, M., & Haid, M. (2024). Leisure constraints towards accessible tourism: Self-characteristics of people with disability along tourism value chains. *Current Issues in Tourism, 28*(18), 3031–3045. https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2394965

Nugroho, P., & Numata, S. (2022). Resident support of community-based tourism development: Evidence from Gunung Ciremai National Park, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism, 30*(11), 2510–2525. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1755675

Park, K., Jeon, H., & Park, S. (2022). Disability e-inclusion for accessible tourism websites. *Current Issues in Tourism, 25*(22), 3571–3578. https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2106195

Ramadani, V. P., & Sukmana, H. (2024). Boosting local economy through strategic tourism development in Indonesia. *Academia Open, 9*(2). https://doi.org/10.21070/acopen.9.2024.8195

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rodrigues, T. (2021). Tourism and intraregional transport: The assimilation of local transport in tourist destination – the perception of Lisbon's residents. *European Transport/Trasporti Europei, 83*, 1–16. https://doi.org/10.48295/et.2021.83.2

Salmah, S., & Rizal, A. (2022). The influence of tourist attraction, destination image and accessibility on interest in visiting tourist objects. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 13*. https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.842

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies, 20*(4), 589–609. https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1450900

Setiawati, R., & Syam, N. K. (2023). Community based tourism (CBT) program. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis, 11*(1), 1–12. https://doi.org/10.46806/jkb.v11i1.985

Sezerel, H., & Karagoz, D. (2023). The challenges of sustainable tourism development in special environmental protected areas: Local resident perceptions in Datça-Bozburun. *Sustainability*, *15*(4), 3364. https://doi.org/10.3390/su15043364

Tao, C., Huang, S., Wang, J., & Qiao, G. (2024). Accessible tourism: Tourists with physical disability – segmentation based on perceived travel barriers. *Tourism Review, 80*(9), 1654–1676. https://doi.org/10.1108/tr-07-2023-0459

Yan, L., Alagas, E. N., Jambulingam, M., & Wang, L. (2024). Destination brand identity as a mediator between accessibility and tourist perception: Promoting Bama Yao as potential wellness tourist destination in China. *Turyzm/Tourism, 34*(1), 109–120. https://doi.org/10.18778/0867-5856.34.1.10

Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2024). Fishermen community participation in Tiku Awareness Tourism Group on sustainable tourism development. *Humanus, 23*(2), 241. https://doi.org/10.24036/humanus.v23i2.125464